



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

MEMPERKUAT PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TENGAH KONFLIK ISRAEL-IRAN

Luthvi Febryka Nola

Analisis Legislatif Ahli Madya

luthvi.nola@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Serangan yang dilakukan Israel terhadap Iran pada 13 Juni 2025 telah membuat suasana di Timur Tengah memanas. Medan pertempuran juga sudah meluas tidak hanya meliputi wilayah kedua negara akan tetapi juga menyasar pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Qatar. Meskipun pada 24 Juni 2025 Israel dan Iran menyepakati gencatan senjata, belum ada jaminan bahwa perang akan berakhir. Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), tidak hanya di Israel, Iran, dan Qatar, tetapi juga di negara-negara sekitarnya, seperti Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Berdasarkan data dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), jumlah PMI di kawasan Timur Tengah cukup besar. Dari tahun 2022–2024 jumlah PMI di Arab Saudi mencapai 18.724 orang, Turki 6.409 orang, Uni Emirat Arab 2.768 orang, Qatar 1.938 orang, dan Kuwait 1.785 orang. Tidak ada data resmi tentang jumlah PMI di Iran dan Israel, namun jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tercatat di Iran mencapai 386 orang, sementara di Israel sebanyak 194 orang. Menurut Menteri KP2MI, jumlah PMI di kawasan Timur Tengah yang sebenarnya jauh lebih besar, melebihi 500.000 orang, namun sebagian besar dari mereka berangkat secara nonprosedural (ilegal) sehingga tidak tercatat secara resmi oleh pemerintah.

Setiap PMI, baik yang berangkat secara legal maupun ilegal, wajib mendapatkan pelindungan. Jaminan atas pelindungan diatur dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Dalam Pasal 7 UU PPMI, pelindungan terhadap calon PMI maupun PMI mencakup pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Dalam konteks konflik antara Israel dan Iran, pemerintah telah mengupayakan ketiga bentuk pelindungan tersebut. Salah satu langkah pelindungan sebelum bekerja diwujudkan dalam bentuk pencegahan keberangkatan calon PMI ke wilayah konflik. Pada 25 Juni 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan KP2MI, berhasil menggagalkan keberangkatan 98 PMI ilegal yang hendak menuju daerah konflik.

Untuk pelindungan selama bekerja, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Judha Nugraha, menyatakan Kemlu telah mengimbau agar para WNI yang saat ini berada di kawasan Timur Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan. Imbauan tersebut mencakup anjuran agar WNI terus memantau perkembangan situasi keamanan dan mengikuti arahan dari otoritas setempat, menghindari area yang menjadi lokasi aset strategis negara-negara yang terlibat konflik, dan mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak bersifat mendesak. Sementara itu, untuk pelindungan setelah bekerja, Kemlu telah melakukan evakuasi terhadap 97 WNI dari Iran dan 4 WNI dari Israel yang di dalamnya termasuk PMI.

Pelindungan pemerintah terhadap PMI di negara yang berkonflik masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu permasalahan adalah masih terbukanya akses penempatan pekerja sektor formal ke negara-negara yang tengah berkonflik di kawasan Timur Tengah. Hal ini disebabkan

disebabkan belum adanya keputusan tegas dari pemerintah mengenai penghentian pengiriman PMI ke wilayah tersebut, padahal Pasal 32 ayat (1) UU PPMI secara jelas memberikan kewenangan pada pemerintah untuk melarang atau menghentikan penempatan PMI di negara tertentu dengan alasan keamanan.

Di sisi lain, perlindungan PMI pada saat bekerja juga terkendala dengan banyaknya jumlah PMI nonprosedural di Timur Tengah yang tidak terdata. Kondisi ini menyulitkan pemantauan dan penyampaian bantuan kepada mereka. Banyak PMI juga enggan untuk kembali ke tanah air karena takut kehilangan pekerjaan, menyebabkan proses evakuasi tidak selalu berjalan lancar. Menyadari hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyatakan akan mempersiapkan program pemberdayaan bagi PMI yang pulang dari negara konflik. Program ini sangat penting untuk mendukung keberlanjutan hidup dan kemandirian para pekerja yang telah kembali.

Atensi DPR

Konflik antara Israel dan Iran telah mengancam keselamatan PMI di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap PMI di kawasan terdampak konflik perlu diperkuat. Komisi IX DPR RI dapat mengambil sejumlah langkah pengawasan, antara lain:

- Meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait situasi PMI di negara yang berkonflik dan upaya perlindungan yang telah dilakukan.
- Mendesak pemerintah untuk menghentikan penempatan PMI ke negara yang berkonflik serta meninjau kembali rencana pencabutan moratorium penempatan PMI pada pengguna perseorangan di kawasan Timur Tengah.
- Mendorong pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga melalui *desk* koordinasi perlindungan PMI dan optimalisasi peran atase ketenagakerjaan di Perwakilan RI.
- Mengimbau pemerintah memperluas sosialisasi kepada calon PMI mengenai situasi keamanan di kawasan Timur Tengah serta memberikan panduan darurat bagi PMI yang telah berada di negara penempatan.
- Mendesak pemerintah untuk mempercepat pendataan PMI dan mengupayakan pemulangan PMI dari wilayah konflik bersenjata.

Sumber

bp2mi.go.id, Januari 2025;
kompas.com, 21 & 24 Juni 2025;
republika.co.id, 26 Juni 2025;
tribunnews.com, 26 Juni 2025; dan
wonosobozone.com, 28 Juni 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*